

# Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi

Mirasty Manggalatu<sup>\*</sup>, Munzir<sup>2</sup>, and Musriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan  
Muhammadiyah Sorong

---

## Abstrak.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sekban, Kabupaten Fakfak, menghadapi tantangan dalam memastikan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa serta peran sistem pengendalian internal (SPI) sebagai variabel moderasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data primer dikumpulkan dari 44 responden penerima BLT-DD melalui kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda serta uji moderasi menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa ( $p < 0,05$ ). Namun, SPI tidak signifikan sebagai variabel moderasi ( $p > 0,05$ ), kemungkinan karena keterbatasan penerapan di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan akuntabilitas melalui pelaporan yang terstruktur dan pelatihan kompetensi perangkat desa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BLT DD.

**Kata Kunci.** Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Desa.

---

\*Corresponding Author : [mirastymira@gmail.com](mailto:mirastymira@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia menjadikan kesejahteraan rakyat, baik individu maupun kelompok, sebagai prioritas utama. Kesejahteraan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang saling terhubung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan (Lazulfa, 2024). Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan program strategis seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang memberikan dukungan finansial langsung kepada warga desa terdampak situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, sehingga kebutuhan dasar terpenuhi dan ketahanan sosial-ekonomi desa meningkat (Bappenas, 2021).

Lebih lanjut, Kementerian Desa (2020) menyatakan bahwa BLT-DD bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan meminimalkan dampak krisis ekonomi. Sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Desa, program ini meningkatkan taraf hidup melalui akses langsung ke dana untuk keperluan sehari-hari (Fadhilla & Irham, 2024). Selain itu, akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya (Rini et al., 2022). Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Abdullah et al., 2022) dalam (Diansari et al., 2023). Dengan akuntabilitas yang baik, jaminan publik di tingkat desa dapat diperkuat, sekaligus menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa atas setiap tindakan yang dilakukan (Mahmud et al., 2024).

Akuntabilitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat (Andriyan et al., 2022), menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BLT-DD. Namun, rendahnya kompetensi perangkat desa dan kurangnya pengawasan sering menghambat akuntabilitas. Sistem pengendalian internal (SPI) dianggap dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja (Wulandary et al., 2022), pemerintah desa melalui prosedur penganggaran, pencatatan, dan pelaporan yang terstruktur (Triana et al., 2023).

**Tabel 1.1 Jumlah Data Penerima BLT Tahun 2020 - 2024**

No	Tahun Penerimaan BLT	Jumlah Penerima	Total Dana BLT
1.	2020	127 Orang	Rp457.200.000,-
2.	2021	127 Orang	Rp457.200.000,-
3.	2022	127 Orang	Rp457.200.000,-
4.	2023	70 Orang	Rp252.000.000,-
5.	2024	50 Orang	Rp180.000.000,-

Sumber: Pemerintah Desa Sekban

Sebagai gambaran konkret, data dari Pemerintah Desa Sekban menunjukkan dinamika pelaksanaan BLT-DD dari tahun 2020 hingga 2024. Pada periode 2020–2022, jumlah penerima BLT tetap sebanyak 127 orang dengan alokasi dana Rp457.200.000 per tahun. Namun, pada tahun 2023, jumlah penerima menurun menjadi 70 orang dengan dana Rp252.000.000, dan pada 2024 kembali turun menjadi 50 orang dengan dana Rp180.000.000. Penurunan ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di desa tersebut, yang memerlukan pengelolaan yang

lebih cermat.

Dalam konteks ini, Pengendalian internal di Kampung Sekban menjadi elemen krusial untuk memastikan pengelolaan dana desa, termasuk BLT-DD, berjalan efektif dan transparan. Melalui sistem pengendalian internal yang baik, prosedur penganggaran, pencatatan, pelaporan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dana dapat dicegah dari penyalahgunaan, sehingga akuntabilitas tetap terjaga (Rahmany & Fatimah, 2020).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan turut memperkuat akuntabilitas sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya (Munzir et al., 2024). Dengan demikian, pengendalian internal yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintah desa, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Kusnadi & Anwar, 2023).

Meskipun demikian, pemahaman tentang peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi (Difinubun et al., 2022) dalam hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa masih terbatas. Selain itu, tantangan dalam distribusi dan penyaluran bantuan menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana, yang masih kurang dieksplorasi dalam literatur, menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan program seperti BLT-DD.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai, sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban Kabupaten Fakfak pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berlandaskan teori keagenan, yang menggambarkan hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen. Teori ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana prinsipal mempercayakan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan sesuai kesepakatan tanpa merugikan kedua belah pihak (Indriasih Dewi, 2022). Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak demi kepentingan bersama (Sonbay, 2022). Teori ini digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan teori keagenan sebagai grand theory menekankan bahwa masyarakat memerlukan pengetahuan untuk menilai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Kusumo et al., 2022).

Teori keagenan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sering terjadi dalam hubungan keagenan (Munzir et al., 2022). Masalah pertama yang sering muncul dalam hubungan keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, masalah ini disebabkan karena adanya

asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi dapat didefinisikan sebagai perbedaan informasi antara agen dan prinsipal (Wahyudi et al., 2021). Dalam teori keagenan, interaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilihat sebagai hubungan keagenan, di mana masyarakat (sebagai prinsipal) memanfaatkan pemerintah (sebagai agen) untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kepentingan mereka (Audia & Mulyani, 2023). Dalam konteks penelitian ini, implikasi dari teori keagenan adalah untuk memantau perilaku pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan dan laporan yang disusun secara berkala, serta mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE, DATA DAN ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif berpijak pada paradigma positivistik, yang menekankan objektivitas dan digunakan untuk meneliti populasi maupun sampel secara sistematis. Ciri khas dari pendekatan ini adalah penggunaan data dalam bentuk angka yang dikumpulkan dan dianalisis guna memperoleh informasi yang akurat dan terukur. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai variabel-variabel yang diteliti dan bagaimana interaksi antar variabel tersebut dalam konteks yang lebih luas (Jailani, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah para penerima BLT-DD ditahun 2024 yaitu sebanyak 50 penerima dengan sampel sebanyak 44 responden yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria sebagai penerima aktif. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju. Instrumen diuji validitas melalui analisis faktor dan reliabilitas dengan Cronbach's Alpha. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja, serta uji moderasi untuk mengevaluasi peran sistem pengendalian internal. Analisis dilakukan dengan SPSS versi 25, dengan tingkat signifikansi 5% ( $p < 0.05$ ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Uji Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah (H1)**

Berdasarkan hasil analisis, akuntabilitas memiliki koefisien beta unstandardized sebesar 0,221 dengan standar error 0,026 dan koefisien beta standardized sebesar 0,433. Nilai t hitung sebesar 9,053 lebih besar dari t tabel (1,976) pada derajat kebebasan ( $df = n - k - 1 = 44 - 3 - 1 = 40$ ) dengan tingkat signifikansi 0,000 ( $p < 0, 05$ ). Selain itu, uji koefisien determinasi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,805, yang mengindikasikan bahwa 80,5% variasi kinerja pemerintah desa dapat dijelaskan oleh akuntabilitas, sementara 19,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban dalam pengelolaan BLT-DD. Dengan demikian,

hipotesis H1 diterima.

## **2. Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (H2)**

Hasil uji menunjukkan bahwa interaksi antara akuntabilitas dan sistem pengendalian internal memiliki koefisien beta unstandardized sebesar -0,012 dengan standar error 0,008. Nilai t hitung sebesar -1,865 lebih kecil dari t tabel (1,976) pada  $df = 40$ , dengan tingkat signifikansi 0,064 ( $p > 0, 05$ ). Uji koefisien determinasi moderasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,686, yang berarti 68,6% variasi kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan interaksi dengan SPI, sedangkan 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal tidak signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis H2 ditolak.

### **B. Pembahasan**

Hasil uji hipotesis H1 menegaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban dalam pengelolaan BLT-DD. Koefisien beta 0,221 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam akuntabilitas (misalnya, melalui pelaporan yang lebih jelas, kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, atau ketepatan sasaran penerima BLT-DD) akan meningkatkan kinerja pemerintah desa sebesar 0,221 unit. Nilai R2 sebesar 0,805 menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting yang menjelaskan sebagian besar variasi kinerja pemerintah desa.

Temuan ini sejalan dengan (Triana et al., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi pengelolaan dana desa. Dalam konteks Desa Sekban, akuntabilitas yang baik, seperti laporan keuangan yang transparan dan komunikasi terbuka dengan masyarakat, memungkinkan penyaluran BLT-DD yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Namun, hasil uji hipotesis H2 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. Nilai signifikansi 0,064 ( $p > 0, 05$ ) dan koefisien beta negatif (-0,012) mengindikasikan bahwa SPI tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam penerapan SPI di Desa Sekban, seperti kurangnya pelatihan bagi perangkat desa, minimnya sumber daya untuk pengawasan, atau prosedur pengendalian yang belum terstandarisasi.

Temuan ini bertentangan dengan ekspektasi awal bahwa sistem pengendalian internal akan memperkuat akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mendukung efektivitas dan kepatuhan organisasi. Di Desa Sekban, meskipun indikator sistem pengendalian internal seperti aturan yang jelas dan verifikasi data penerima memperoleh skor tinggi, sistem ini tampaknya tidak berperan sebagai katalis dalam hubungan antara akuntabilitas dan kinerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya variasi

dalam penerapan sistem pengendalian internal, sehingga tidak menghasilkan efek moderasi yang signifikan.

Penelitian (Kusnadi & Anwar, 2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi hanya jika disertai dengan pelatihan dan komitmen yang kuat dari petugas desa. Di Desa Sekban, skor rata-rata rendah (3,56) pada pemberitahuan melalui media atau petugas desa (Z12) mengindikasikan bahwa komunikasi internal mungkin belum optimal, sehingga melemahkan peran moderasi sistem pengendalian internal. Selain itu, (Rahmany & Fatimah, 2020) mencatat bahwa sistem pengendalian internal sering kali tidak efektif sebagai moderator jika organisasi memiliki sumber daya terbatas, seperti di desa-desa kecil seperti Sekban dengan hanya 302 kepala keluarga.

Meskipun sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan ini, akuntabilitas itu sendiri tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (H1). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Sekban lebih bergantung pada komitmen petugas dan kepercayaan masyarakat daripada pada sistem pengendalian internal. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah desa dapat memperkuat pelatihan dan pemantauan internal, seperti yang disarankan oleh (Mattoasi et al., 2021), untuk memastikan sistem pengendalian internal dapat mendukung akuntabilitas secara lebih signifikan

Selain itu, dalam konteks teori keagenan, hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah desa (agen) sangat bergantung pada akuntabilitas untuk mengurangi asimetri informasi. Namun, ketidakefektifan SPI sebagai moderasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian tambahan, seperti pelatihan atau teknologi informasi untuk pelaporan, perlu diperkuat untuk mendukung akuntabilitas yang lebih baik. Penelitian ini juga mencerminkan tantangan di desa-desa kecil, di mana keterbatasan sumber daya sering kali menghambat implementasi sistem pengendalian yang robust.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Sekban dalam pengelolaan BLT-DD. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa Sekban.

Pemerintah desa disarankan untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang terstruktur dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dan (2) Mengadakan pelatihan untuk memperkuat penerapan SPI. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk dapat mengeksplorasi variabel kualitatif seperti persepsi masyarakat terhadap pengelolaan BLT-DD.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17–24.

- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kepatuhan Undang-Undang Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Persepsi Perilaku Prososial Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia: Peran Moderasi Pengendalian Internal Dan Kepemimpinan. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(4), 1–24.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34–45.
- Fadhilla, R. A., & Irham, M. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 38–47.
- Indriasih Dewi, D. (2022). The Role Of Commitment, Competence, Internal Control System, Transparency And Accessibility In Predicting The Accountability Of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1).
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Kusnadi, K., & Anwar, A. P. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 59–74.
- Kusumo, W. K., Achmad, T., & Zulaikha. (2022). Effectiveness Of Internal Control System As Early Detection Tool In Fraud Prevention Of Village Fund Management. *Review Of Economics And Finance*, 20, 119–123. <https://doi.org/10.55365/1923.X2022.20.12>
- Lazulfa, A. S. (2024). Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 109–120.
- Mahmud, A., Susilowati, N., Handayani, B. D., Leonita, A., & Santoso, A. (2024). Smart Village: Evaluating The Role Of Siskeudes Management In Enhancing Village Fund Accountability. *Edelweiss Applied Science And Technology*, 8(6), 7712–7725. <https://doi.org/10.55214/25768484.V8i6.3679>
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Leverage Pada Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18–32.
- Munzir, M., Difinubun, Y., Wulandary, A., Azisah, N., Astuti, S., & Darmayanti, I. (2024). Budgeting And Control Problems In Warmon Kokoda Village, Sorong Regency. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 56–63.
- Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123.

- Rini, T. H. C., Khaerani, A., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Bumn Di Kota Sorong. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 57–69.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 204–223.
- Triana, E., Rahman, A., & Fatih, H. M. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(2), 134–145.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village Apparatus Competence, Individual Morality, Internal Control System And Whistleblowing System On Village Fund Fraud. *Wseas Transactions On Environment And Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wulandary, A., Sada, R. L., & Yapen, S. (2022). Pengaruh Tindak Lanjut Auditor Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 84–92.